

Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Andi Pattiware

Akuntansi, STIEM Bongaya Makassar

andi.pattiware@stiem-bongaya.ac.id

(Received: September 20, 2023; Revised: October 23, 2023; Accepted: October 31, 2023)

Abstract: *The aim of this research is to determine the influence of awareness, tax knowledge, and economic conditions on PBB-P2 taxpayer compliance in Bontonompo District. Data collection uses primary data used in distributing questionnaires. There were 67 samples who were the objects of this research from the total number of PBB-P2 taxpayers in Bontonompo District. Data collection methods are descriptive analysis, multicollinearity test, and heteroscedasticity test with multiple linear regression data analysis methods using SPSS 22 software. The conclusions in this research show that awareness has an impact but is not significant on PBB-P2 taxpayer compliance, tax knowledge has a positive impact on PBB-P2 taxpayer compliance, and economic conditions have a positive impact on PBB-P2 taxpayer compliance.*

Keywords: *Awareness, tax knowledge, economic conditions, taxpayer compliance*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak pbb-p2 di Kecamatan Bontonompo. Pengumpulan data menggunakan data primer yang digunakan dalam menyebarkan kuesioner. Terdapat 67 orang sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini dari total jumlah wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kecamatan Bontonompo. Metode pengumpulan data ialah analisis deskriptif, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas dengan metode analisis data regresi linear berganda dengan alat bantu software SPSS 22. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran memberikan dampak tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, pengetahuan perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dan kondisi ekonomi memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kata Kunci: Kesadaran, pengetahuan perpajakan, kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia semakin berbenah dalam hal peningkatan pembangunan nasional disegala sektor untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sejumlah program-program pembangunan baik itu dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosialbudaya dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari berbagai pembangunan yang sedang digiatkan oleh pemerintah seperti terlihat sekarang ini. Semakin intensnya pembangunan disegala sektor kehidupan masyarakat turut meningkatkan belanja negara. Untuk membiayai segala kebutuhan finansialnya, pemerintah mengandalkan pendapatan dari sektor pajak.

Negara hadir dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang didasari atas keadilan sosial serta tercapainya pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peranan pajak dalam merealisasikan tujuan tersebut sangatlah penting mengingat pajak adalah sumber utama pendanaan Negara, yang akan diperuntukkan untuk mendanai belanja rumah tangga Negara secara rutin (Ummuh,2015).

Hasil pembayaran pajak dari masyarakat utamanya digunakan untuk membangun negara ini agar hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi merupakan sebagian contoh peran pajak yang dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari. Pentingnya peranan pajak dalam kemajuan suatu negara membutuhkan adanya peningkatan dalam penerimaan pajak (Astawa, 2020).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 "*Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Rismawati dan Antong dalam (Sari N.I.,2020) juga mengemukakan pendapat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam terciptanya pembangunan, oleh karenanya perlu pengelolaan yang baik dan tentunya didukung dengan peranserta masyarakat sesuai dengan kemampuannya guna tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat sesuai dari amanat Pancasila.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperuntukkan atas bumi dan bangunan yang dikuasai oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Menurut UU ini yang dimaksud dengan "*bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia sedangkan, bangunan itu berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan*". Pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai salah satu pajak yang strategis, mengingat luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia. Eksistensinya sebagai salah satu jenis penerimaan pajak tidak lain karena bumi dan bangunan telah memberikan nilai tambah dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu atas haknya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan juga bentuk dari peran serta masyarakat dalam mendorong pembangunan perekonomian di daerah.

(Fitrianingsih, *et al.* 2018) Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menghambat penerimaan pajak yang pertama adalah masalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak di Indonesia masih cenderung minim karena pajak digambarkan sebagai suatu beban dan identik dengan penajajahan. Kedua adalah pengetahuan wajib pajak yang masih terbelakang akan makna dari pembayaran pajak. Ketiga adalah masalah kondisi ekonomi wajib pajak, semakin baik kondisi ekonominya maka dalam memikul beban pajaknya juga tidak akan mengganggu kehidupan sehari-harinya.

Rumusan masalah yang diajukan akan bersifat simultan dan parsial sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Bntonompo?
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Bntonompo?
3. Apakah Kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kecamatan Bntonompo?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak PBB-P2

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau lebih familiar disebut pajak PBB-P2 merupakan pajak yang ditarik dari ekonomi masyarakat baik itu orang pribadi atau badan akibat dari kepemilikan lahan atau bangunan yang melekat diatas muka bumi maupun dibawahnya yang berdiri secara permanen atau semi permanen yang dimiliki, dikuasai, serta memberikan manfaat ekonomi maka wajib membayarkannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

Kesadaran Wajib pajak

Menurut Siti (2017:191) mendefinisikan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran merupakan rasa yang tumbuh dalam diri wajib pajak akan tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang baik dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka akan berdampak terhadap setiap pembangunan yang digalakkan pemerintah. Sebab kesadaran terhadap kewajiban perpajakan turut memberikan andil dalam tercapainya pembangunan yang berkesinambungan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Nazir, 2010). Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2.

Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan keadaan wajib pajak bumi dan bangunan yang ditinjau dari kemampuan pendapatan perbulan wajib pajak yang dikomparasikan dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari disertai juga dengan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Lestari:2017). Dengan perbaikan kondisi ekonomi wajib pajak maka diharapkan bahwa wajib pajak dapat turut andil dalam mendukung pembangun Negara. Bukan hanya kebutuhan hidupnya yang terpenuhi akan tetapi kewajibannya sebagai waraga Negara yang baik berupa pemenuhan kewajiban perpajakannya juga terlaksana. Kusfatmawati (2015) juga menjelaskan bahwa kondisi ekonoimi adalah kedudukan suatu individu atau keluarga dalam masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Artinya wajib pajak sangat bergantung terhadap jumlah pendapatan yang diterimanya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Rahayu (2010) dalam (Setiyani, Andini, & Oemar, 2018) kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan mendorong peningkatan kondisi sistem administrasi perpajakan yang lebih baik dan lebih sederhana agar mempermudah wajib pajak, peningkatan pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan yang tegas dan adil, pemerikasaan pajak serta informasi tentang tarif pajak.

Hipotesis

H1: Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

H2: Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

H3: Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

METODE ANALISIS

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:08) “penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesisi yang telah ditetapkan”. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan indikator penelitian) sehingga data yang berupa angka-angka dapat dianalisa sesuai dengan prosedur statistik. Penelitian ini menerapkan acuan analisis statistik deskriptif untuk menila dan memberikan deskripsi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std Deviasi	8.985469297
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.050

Test Statistic		.096
Asymp.Sig. (2-tailed)		.200

Berkesesuaian dengan tabel diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai signifikan sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficient

		<i>Collineary Statistics</i>	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran	2.101	2.064
	Pengetahuan	.348	2.348
	Kondisi Ekonomi	.323	1.864

Bersesuaian tabel diatas dapat ditentukan bahwa nilai *tolerance* variabel Kesadaran (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kondisi Ekonomi (X3) setiap indikator mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF lebih kecil dari 10.00. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa tidak terjadi Multikolonieritas sehingga layak untuk digunakan dan memenuhi uji Asumsi Klasik pada uji multikolonieritas.

Uji Heterokedastistas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedistitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.650	.778		5.572	.000
	Kesadaran	-.013	.053	-.544	-2.653	.814
	Pengetahuan	.067	.070		.624	.344
	Kondisi Ekonomi	-.027	.043	.128	-.619	.538

Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Berkesesuaian tabel diatas dapat ditentukan bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0.05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap variabel. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi uji Asumsi Klasik pada uji heteroskedastisitas.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	67	16	24	20.27	2.115
Pengetahuan	67	9	16	12.85	1.702
Kondisi Ekonomi	67	15	23	18.87	2.492
Kesadaran	67	11	16	13.18	1.585

Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Berdasarkan pada tabel 5.14 diatas, nilai rata-rata (mean) variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) 20.27 lebih besar dari standar deviasi yaitu 2.115, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) 12.85 lebih

besar dari standar deviasi 1.708, Kondisi Ekonomi (X3) 18.87 lebih besar dari standard deviasi 2.492. Ini menunjukkan bahwa penyebaran data instrument masing-masing variabel X1, X2, dan X3 adalah baik. Begitupun dengan nilai rata-rata (mean) variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) 13.18 lebih besar dari standar deviasi 1.585 yang berarti data yang disebar baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Ekonomi dan Kepatuhan Wajib Pajak dikatakan baik karena nilai avearge setiap instrument lebih besar dari standar deviasinya.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.101	1.232		1.705	.093
Pengetahuan	.110	.084	.147	1.305	.197
Kondisi Ekonomi	.348	.111	.374	3.120	.003
Kesadaran	.232	.068	.365	3.415	.001

- a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
 Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Sesuai dengan hasil analisa dari regresi linear berganda pada tabel 5.15 diatas juga diketahui bahwa nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar 0.110, Pengetahuan Perpajakan (X2) 0.348, Kondisi Ekonomi (X3) sebesar 0.232 dan nilai konstanta sebesar 2.101. dengan demikian diperoleh bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.101 + 0.110X1 + 0.348X2 + 0.232X3$$

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Partial (Uji-t)

Model		t	Sig
1	(Constant)	1.706	.093
	Pengetahuan	1.305	.197
	Kondisi Ekonomi	3.120	.003
	Kesadaran	3.415	.001

Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Berlandaskan tabel diatas menunjukkan bahwa Uji t untuk pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar $0.197 > 0.05$ dengan nilai Thitung $1.305 < T_{tabel} 1.998$. Nilai Ttabel diperoleh dari rumus $=TINV(5\%;63)$. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, bahwa H_1 dibantahkan dan H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial bahwa Kesadaran tidak berkontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Berlandaskan tabel diatas menunjukkan bahwa Uji t untuk pengaruh Pengetahuan Parpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar $0.003 < 0.05$ dengan nilai Thitung $3.120 > T_{tabel} 1.998$. Nilai Ttabel diperoleh dari rumus $=TINV(5\%;63)$. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, bahwa H_0 dibantahkan dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara

parsial bahwa Pengetahuan Perpajakan berkontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berlandaskan tabel diatas menunjukkan bahwa Uji t untuk pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 mempunyai nilai signifikan sebesar $0.001 < 0.05$ dengan nilai Thitung $3.415 > T_{tabel} 1.998$. Nilai T_{tabel} diperoleh dari rumus= $TINV(5\%;63)$. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan, bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial bahwa Kondisi Ekonomi berkontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Uji Simultan (Uji f)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji-f)

Model		f	Sig
1	Regression	101.755	.000
	Residual	64.096	
	Total	165.851	

Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Berdasarkan tabel 5.16 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 33.338 pada derajat kepercayaan 95% dan derajat bebas (3 : 63) yang diperoleh dari $(n-k-1) 67-3-1=63$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2.751 nilai ini dapat dicari dengan rumus= $FINV(5\%,3,63)$.

Oleh karena $F_{hitung} 33.338$ lebih besar dibanding $F_{tabel} 2.751$ dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan derajat kepercayaan 95% dapat ditarik benang merah bahwa Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi secara simultan berkontribusi signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square
1	.783	.614

Sumber :Data diolah dengan bantuan SPSS 23.0

Berlandaskan nilai tabel 5.18 diatas menunjukkan hasil R^2 yaitu sebesar 0.614. Hal ini berarti variabel independen (Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi) dapat menerangkan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 61,4% sedangkan 38.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.

Intepretasi Hasil Penelitian

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

Kesadaran terhadap kepatuhan pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) adalah faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak di suatu negara. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Tingkat kesadaran terhadap kepatuhan pajak ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah maupun nasional. Ketika sistem perpajakan dan prosedur penegakan hukum terkait pajak jelas dan konsisten, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2. Ketika wajib pajak yakin bahwa otoritas pajak dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan, termasuk ketentuan PBB-P2, memungkinkan wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Mereka akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak

properti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami bagaimana dana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik dan pelayanan masyarakat. Dengan pemahaman ini, wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

Kondisi ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berbagai aspek dalam kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kondisi ekonomi yang buruk, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi atau penurunan pendapatan, dapat memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak properti. Jika pendapatan menurun, wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, yang dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak.

Kesimpulan

Maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo. Kondisi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Bontonompo.

Daftar Pustaka

- Andriani, G. R. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta*.
- Aswati, w. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTBSAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. III, 27-39.
- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*, Vol. 2, 1-15.
- Darmawan, R. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). *Skripsi. Universitas Negeri Palembang*.
- Fitria, F. A. (2020). Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB Dengan Kotrol Petugas Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi. STIE Malangkecewara*.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. *e- Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. V(1), 100-104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24*. Edisi Sembilan. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Maghriby, B. (2020). Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan, Vol. 14*(No.1), 288-300.
- Nazir, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 5*(2), 85-100.
- Nuraini, L. (2009). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Peranan Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 2008. *Skripsi. Universitas Sebelas Maret*.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., & Iswono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, Vol. 4*(1), 18-31.
- Rachman, A. (2013). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. *Academia*.
- Ratri, Y. I. (2018). Analisis Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Membayar Pajak PBB P2. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta*.
- Rosyida, A. I. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting, Vol. 1*(1), 29-43.
- Sari, A. (2020). Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Setiyono, B. (2017). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *Jurnal. Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Shopana, R. W., Suharno, & Kristanto, D. (2016). Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah dan Sanksi Administrasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 12*(No. 4), 480-488.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.
- Usnan, Budiarto, W., & Prasetyo, I. (2021). Analisis Tingkat Partisipasi, Sikap dan Perilaku, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pendapatan PBB di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 5 (No. 4), 194-206.